



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN
ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat pemutakhiran data dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian alokasi dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya menurut provinsi/kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan rincian alokasi dana insentif fiskal menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Tabel V.17 Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (17) huruf a Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, penyesuaian rincian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

2. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan penyesuaian atas rincian alokasi dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap provinsi/kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan telah menerima penyaluran tahap I, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memperhitungkan kelebihan atau kekurangan penyaluran pada tahap I dengan penyaluran pada tahap II.

KETIGA : Terhadap provinsi/kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah menerima penyaluran tahap I yang melebihi total alokasi dana insentif fiskal yang seharusnya diterima provinsi/kabupaten/kota, dan tidak dapat menerima penyaluran tahap II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memperhitungkan kelebihan penyaluran dengan penyaluran dana alokasi umum tahun anggaran 2025 dan/atau tahun anggaran 2026.

KEEMPAT : Terhadap provinsi/kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sehingga mengalami kekurangan penyaluran tahap I dan tidak dapat menerima penyaluran pada tahap II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memperhitungkan kekurangan penyaluran dan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Provinsi/kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan dana insentif fiskal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA

PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN
SEBELUMNYA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
1.	Provinsi Aceh	-
2.	Kab. Aceh Barat	-
3.	Kab. Aceh Besar	-
4.	Kab. Aceh Selatan	-
5.	Kab. Aceh Singkil	-
6.	Kab. Aceh Tengah	7.158.908
7.	Kab. Aceh Tenggara	-
8.	Kab. Aceh Timur	-
9.	Kab. Aceh Utara	-
10.	Kab. Bireuen	-
11.	Kab. Pidie	-
12.	Kab. Simeulue	-
13.	Kota Banda Aceh	15.527.812
14.	Kota Sabang	13.677.689
15.	Kota Langsa	-
16.	Kota Lhokseumawe	7.385.226
17.	Kab. Gayo Lues	-
18.	Kab. Aceh Barat Daya	6.911.270
19.	Kab. Aceh Jaya	-
20.	Kab. Nagan Raya	-
21.	Kab. Aceh Tamiang	-
22.	Kab. Bener Meriah	6.995.436
23.	Kab. Pidie Jaya	-
24.	Kota Subulussalam	-
25.	Provinsi Sumatera Utara	-
26.	Kab. Asahan	14.519.419
27.	Kab. Dairi	-

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
28.	Kab. Deli Serdang	14.072.525
29.	Kab. Karo	6.668.790
30.	Kab. Labuhanbatu	-
31.	Kab. Langkat	-
32.	Kab. Mandailing Natal	7.116.040
33.	Kab. Nias	22.506.532
34.	Kab. Simalungun	-
35.	Kab. Tapanuli Selatan	7.304.056
36.	Kab. Tapanuli Tengah	-
37.	Kab. Tapanuli Utara	14.881.571
38.	Kab. Toba	7.134.069
39.	Kota Binjai	-
40.	Kota Medan	-
41.	Kota Pematang Siantar	7.327.354
42.	Kota Sibolga	-
43.	Kota Tanjung Balai	7.139.409
44.	Kota Tebing Tinggi	13.719.452
45.	Kota Padangsidimpuan	-
46.	Kab. Pakpak Bharat	-
47.	Kab. Nias Selatan	14.443.800
48.	Kab. Humbang Hasundutan	6.546.805
49.	Kab. Serdang Bedagai	15.086.442
50.	Kab. Samosir	-
51.	Kab. Batu Bara	-
52.	Kab. Padang Lawas	-
53.	Kab. Padang Lawas Utara	7.623.448
54.	Kab. Labuhanbatu Selatan	7.233.497
55.	Kab. Labuhanbatu Utara	7.108.712
56.	Kab. Nias Utara	14.906.329
57.	Kab. Nias Barat	14.522.717
58.	Kota Gunungsitoli	-
59.	Provinsi Sumatera Barat	15.594.394
60.	Kab. Lima Puluh Kota	-
61.	Kab. Agam	-
62.	Kab. Kepulauan Mentawai	21.715.422
63.	Kab. Padang Pariaman	7.113.627
64.	Kab. Pasaman	-
65.	Kab. Pesisir Selatan	-
66.	Kab. Sijunjung	6.986.983

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
67.	Kab. Solok	-
68.	Kab. Tanah Datar	16.404.520
69.	Kota Bukittinggi	-
70.	Kota Padang Panjang	-
71.	Kota Padang	16.374.531
72.	Kota Payakumbuh	8.671.856
73.	Kota Sawahlunto	8.752.114
74.	Kota Solok	20.917.821
75.	Kota Pariaman	6.963.163
76.	Kab. Pasaman Barat	-
77.	Kab. Dharmasraya	7.201.621
78.	Kab. Solok Selatan	7.294.478
79.	Provinsi Riau	-
80.	Kab. Bengkalis	7.845.178
81.	Kab. Indragiri Hilir	14.388.264
82.	Kab. Indragiri Hulu	14.190.971
83.	Kab. Kampar	15.095.240
84.	Kab. Kuantan Singingi	-
85.	Kab. Pelalawan	14.401.931
86.	Kab. Rokan Hilir	-
87.	Kab. Rokan Hulu	7.175.734
88.	Kab. Siak	15.172.751
89.	Kota Dumai	6.957.996
90.	Kota Pekanbaru	15.652.677
91.	Kab. Kepulauan Meranti	-
92.	Provinsi Jambi	-
93.	Kab. Batanghari	7.092.642
94.	Kab. Bungo	7.268.471
95.	Kab. Kerinci	7.360.041
96.	Kab. Merangin	-
97.	Kab. Muaro Jambi	7.345.234
98.	Kab. Sarolangun	7.419.814
99.	Kab. Tanjung Jabung Barat	-
100.	Kab. Tanjung Jabung Timur	7.383.633
101.	Kab. Tebo	7.937.702
102.	Kota Jambi	-
103.	Kota Sungai Penuh	7.631.633
104.	Provinsi Sumatera Selatan	6.489.293
105.	Kab. Lahat	7.010.619

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
106.	Kab. Musi Banyuasin	-
107.	Kab. Musi Rawas	-
108.	Kab. Muara Enim	-
109.	Kab. Ogan Komering Ilir	7.046.347
110.	Kab. Ogan Komering Ulu	-
111.	Kota Palembang	-
112.	Kota Prabumulih	-
113.	Kota Pagar Alam	-
114.	Kota Lubuk Linggau	7.945.124
115.	Kab. Banyuasin	7.911.022
116.	Kab. Ogan Ilir	7.031.606
117.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	21.972.818
118.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-
119.	Kab. Empat Lawang	-
120.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-
121.	Kab. Musi Rawas Utara	9.025.306
122.	Provinsi Bengkulu	6.565.019
123.	Kab. Bengkulu Selatan	7.015.031
124.	Kab. Bengkulu Utara	-
125.	Kab. Rejang Lebong	-
126.	Kota Bengkulu	-
127.	Kab. Kaur	-
128.	Kab. Seluma	-
129.	Kab. Mukomuko	-
130.	Kab. Lebong	7.247.559
131.	Kab. Kepahiang	-
132.	Kab. Bengkulu Tengah	-
133.	Provinsi Lampung	-
134.	Kab. Lampung Barat	7.639.595
135.	Kab. Lampung Selatan	15.172.793
136.	Kab. Lampung Tengah	7.877.955
137.	Kab. Lampung Utara	7.593.331
138.	Kab. Lampung Timur	-
139.	Kab. Tanggamus	-
140.	Kab. Tulang Bawang	7.331.903
141.	Kab. Way Kanan	-
142.	Kota Bandar Lampung	-
143.	Kota Metro	21.120.280
144.	Kab. Pesawaran	7.351.641

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
145.	Kab. Pringsewu	14.144.218
146.	Kab. Mesuji	7.507.964
147.	Kab. Tulang Bawang Barat	14.931.599
148.	Kab. Pesisir Barat	15.831.170
149.	Provinsi DKI Jakarta	31.797.533
150.	Provinsi Jawa Barat	-
151.	Kab. Bandung	6.922.806
152.	Kab. Bekasi	-
153.	Kab. Bogor	-
154.	Kab. Ciamis	16.006.829
155.	Kab. Cianjur	14.200.362
156.	Kab. Cirebon	-
157.	Kab. Garut	-
158.	Kab. Indramayu	7.112.858
159.	Kab. Karawang	7.224.672
160.	Kab. Kuningan	-
161.	Kab. Majalengka	13.581.637
162.	Kab. Purwakarta	-
163.	Kab. Subang	7.182.606
164.	Kab. Sukabumi	-
165.	Kab. Sumedang	28.610.956
166.	Kab. Tasikmalaya	7.130.495
167.	Kota Bandung	-
168.	Kota Bekasi	-
169.	Kota Bogor	16.164.800
170.	Kota Cirebon	-
171.	Kota Depok	6.837.475
172.	Kota Sukabumi	-
173.	Kota Tasikmalaya	-
174.	Kota Cimahi	15.105.852
175.	Kota Banjar	7.260.689
176.	Kab. Bandung Barat	8.201.462
177.	Kab. Pangandaran	-
178.	Provinsi Jawa Tengah	8.436.080
179.	Kab. Banjarnegara	-
180.	Kab. Banyumas	22.647.785
181.	Kab. Batang	7.298.922
182.	Kab. Blora	15.783.485
183.	Kab. Boyolali	7.067.394

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
184.	Kab. Brebes	6.915.077
185.	Kab. Cilacap	7.928.807
186.	Kab. Demak	14.887.109
187.	Kab. Grobogan	7.182.904
188.	Kab. Jepara	21.276.807
189.	Kab. Karanganyar	16.499.104
190.	Kab. Kebumen	24.222.868
191.	Kab. Kendal	14.773.497
192.	Kab. Klaten	15.877.103
193.	Kab. Kudus	21.901.717
194.	Kab. Magelang	14.017.060
195.	Kab. Pati	14.976.530
196.	Kab. Pekalongan	7.151.300
197.	Kab. Pemalang	-
198.	Kab. Purbalingga	-
199.	Kab. Purworejo	6.564.101
200.	Kab. Rembang	7.621.391
201.	Kab. Semarang	14.519.953
202.	Kab. Sragen	16.066.363
203.	Kab. Sukoharjo	13.734.253
204.	Kab. Tegal	7.231.265
205.	Kab. Temanggung	9.002.280
206.	Kab. Wonogiri	16.616.491
207.	Kab. Wonosobo	-
208.	Kota Magelang	15.289.430
209.	Kota Pekalongan	7.216.498
210.	Kota Salatiga	8.989.406
211.	Kota Semarang	29.284.482
212.	Kota Surakarta	6.920.583
213.	Kota Tegal	-
214.	Provinsi DI Yogyakarta	8.452.393
215.	Kab. Bantul	22.624.496
216.	Kab. Gunung Kidul	20.512.460
217.	Kab. Kulon Progo	14.793.600
218.	Kab. Sleman	24.219.106
219.	Kota Yogyakarta	15.715.950
220.	Provinsi Jawa Timur	25.308.240
221.	Kab. Bangkalan	-
222.	Kab. Banyuwangi	32.035.778

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
223.	Kab. Blitar	7.699.226
224.	Kab. Bojonegoro	14.541.148
225.	Kab. Bondowoso	-
226.	Kab. Gresik	22.200.037
227.	Kab. Jember	7.026.762
228.	Kab. Jombang	16.166.983
229.	Kab. Kediri	15.234.136
230.	Kab. Lamongan	28.598.556
231.	Kab. Lumajang	22.999.212
232.	Kab. Madiun	22.517.566
233.	Kab. Magetan	15.228.821
234.	Kab. Malang	15.545.585
235.	Kab. Mojokerto	15.638.992
236.	Kab. Nganjuk	14.791.123
237.	Kab. Ngawi	15.441.720
238.	Kab. Pacitan	14.664.399
239.	Kab. Pamekasan	23.417.922
240.	Kab. Pasuruan	-
241.	Kab. Ponorogo	15.070.888
242.	Kab. Probolinggo	7.167.295
243.	Kab. Sampang	7.848.369
244.	Kab. Sidoarjo	14.428.969
245.	Kab. Situbondo	15.308.361
246.	Kab. Sumenep	7.006.290
247.	Kab. Trenggalek	31.726.484
248.	Kab. Tuban	-
249.	Kab. Tulungagung	6.595.559
250.	Kota Blitar	-
251.	Kota Kediri	8.108.479
252.	Kota Madiun	29.100.773
253.	Kota Malang	6.858.227
254.	Kota Mojokerto	-
255.	Kota Pasuruan	-
256.	Kota Probolinggo	14.589.713
257.	Kota Surabaya	29.199.862
258.	Kota Batu	8.261.815
259.	Provinsi Kalimantan Barat	-
260.	Kab. Bengkayang	7.438.168
261.	Kab. Landak	-

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
262.	Kab. Kapuas Hulu	7.329.568
263.	Kab. Ketapang	-
264.	Kab. Mempawah	-
265.	Kab. Sambas	-
266.	Kab. Sanggau	7.711.562
267.	Kab. Sintang	-
268.	Kota Pontianak	7.638.759
269.	Kota Singkawang	7.429.123
270.	Kab. Sekadau	7.360.289
271.	Kab. Melawi	-
272.	Kab. Kayong Utara	-
273.	Kab. Kubu Raya	7.046.356
274.	Provinsi Kalimantan Tengah	-
275.	Kab. Barito Selatan	-
276.	Kab. Barito Utara	-
277.	Kab. Kapuas	-
278.	Kab. Kotawaringin Barat	7.346.458
279.	Kab. Kotawaringin Timur	13.673.191
280.	Kota Palangkaraya	15.976.445
281.	Kab. Katingan	-
282.	Kab. Seruyan	7.975.790
283.	Kab. Sukamara	-
284.	Kab. Lamandau	21.186.325
285.	Kab. Gunung Mas	7.360.767
286.	Kab. Pulang Pisau	13.808.580
287.	Kab. Murung Raya	-
288.	Kab. Barito Timur	14.414.214
289.	Provinsi Kalimantan Selatan	6.489.293
290.	Kab. Banjar	7.311.345
291.	Kab. Barito Kuala	7.373.731
292.	Kab. Hulu Sungai Selatan	30.310.455
293.	Kab. Hulu Sungai Tengah	-
294.	Kab. Hulu Sungai Utara	15.226.701
295.	Kab. Kotabaru	6.951.815
296.	Kab. Tabalong	29.043.382
297.	Kab. Tanah Laut	7.592.690
298.	Kab. Tapin	22.843.013
299.	Kota Banjarbaru	-
300.	Kota Banjarmasin	14.040.453

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
301.	Kab. Balangan	22.296.663
302.	Kab. Tanah Bumbu	7.130.235
303.	Provinsi Kalimantan Timur	21.414.666
304.	Kab. Berau	6.999.290
305.	Kab. Kutai Kartanegara	15.684.292
306.	Kab. Kutai Barat	-
307.	Kab. Kutai Timur	-
308.	Kab. Paser	-
309.	Kota Balikpapan	7.893.239
310.	Kota Bontang	-
311.	Kota Samarinda	7.488.933
312.	Kab. Penajam Paser Utara	-
313.	Kab. Mahakam Ulu	-
314.	Provinsi Sulawesi Utara	15.023.051
315.	Kab. Bolaang Mongondow	-
316.	Kab. Minahasa	16.307.577
317.	Kab. Kepulauan Sangihe	7.694.206
318.	Kota Bitung	7.871.735
319.	Kota Manado	8.127.733
320.	Kab. Kepulauan Talaud	13.766.018
321.	Kab. Minahasa Selatan	-
322.	Kota Tomohon	20.386.711
323.	Kab. Minahasa Utara	9.392.071
324.	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-
325.	Kota Kotamobagu	-
326.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-
327.	Kab. Minahasa Tenggara	-
328.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-
329.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-
330.	Provinsi Sulawesi Tengah	-
331.	Kab. Banggai	-
332.	Kab. Banggai Kepulauan	-
333.	Kab. Buol	-
334.	Kab. Toli-Toli	-
335.	Kab. Donggala	21.769.868
336.	Kab. Morowali	-
337.	Kab. Poso	7.331.024
338.	Kota Palu	7.519.537
339.	Kab. Parigi Moutong	-

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
340.	Kab. Tojo Una-Una	14.575.435
341.	Kab. Sigi	21.514.135
342.	Kab. Banggai Laut	-
343.	Kab. Morowali Utara	14.937.448
344.	Provinsi Sulawesi Selatan	30.573.393
345.	Kab. Bantaeng	8.036.282
346.	Kab. Barru	8.289.679
347.	Kab. Bone	16.769.302
348.	Kab. Bulukumba	-
349.	Kab. Enrekang	14.301.424
350.	Kab. Gowa	14.839.493
351.	Kab. Jenepono	-
352.	Kab. Luwu	7.164.565
353.	Kab. Luwu Utara	22.622.237
354.	Kab. Maros	-
355.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	7.111.125
356.	Kota Palopo	6.442.293
357.	Kab. Luwu Timur	6.943.228
358.	Kab. Pinrang	7.689.546
359.	Kab. Sinjai	7.891.167
360.	Kab. Kepulauan Selayar	6.852.700
361.	Kab. Sidenreng Rappang	6.994.773
362.	Kab. Soppeng	15.237.328
363.	Kab. Takalar	7.974.153
364.	Kab. Tana Toraja	-
365.	Kab. Wajo	15.567.875
366.	Kota Parepare	-
367.	Kota Makassar	7.950.814
368.	Kab. Toraja Utara	7.048.676
369.	Provinsi Sulawesi Tenggara	-
370.	Kab. Buton	-
371.	Kab. Konawe	7.890.854
372.	Kab. Kolaka	6.907.218
373.	Kab. Muna	-
374.	Kota Kendari	6.849.441
375.	Kota Baubau	6.873.937
376.	Kab. Konawe Selatan	7.558.760
377.	Kab. Bombana	-
378.	Kab. Wakatobi	-

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
379.	Kab. Kolaka Utara	7.189.743
380.	Kab. Konawe Utara	-
381.	Kab. Buton Utara	8.026.481
382.	Kab. Konawe Kepulauan	-
383.	Kab. Kolaka Timur	-
384.	Kab. Muna Barat	-
385.	Kab. Buton Tengah	-
386.	Kab. Buton Selatan	-
387.	Provinsi Bali	12.978.586
388.	Kab. Badung	31.467.944
389.	Kab. Bangli	30.352.227
390.	Kab. Buleleng	22.179.842
391.	Kab. Gianyar	31.128.326
392.	Kab. Jembrana	14.658.841
393.	Kab. Karangasem	21.457.852
394.	Kab. Klungkung	23.640.239
395.	Kab. Tabanan	24.157.701
396.	Kota Denpasar	21.645.986
397.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-
398.	Kab. Bima	-
399.	Kab. Dompu	-
400.	Kab. Lombok Barat	16.005.532
401.	Kab. Lombok Tengah	7.888.237
402.	Kab. Lombok Timur	7.819.426
403.	Kab. Sumbawa	-
404.	Kota Mataram	15.109.191
405.	Kota Bima	7.477.005
406.	Kab. Sumbawa Barat	7.385.625
407.	Kab. Lombok Utara	25.597.621
408.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	6.700.771
409.	Kab. Alor	21.842.026
410.	Kab. Belu	15.381.360
411.	Kab. Ende	-
412.	Kab. Flores Timur	-
413.	Kab. Kupang	13.632.475
414.	Kab. Lembata	24.105.142
415.	Kab. Manggarai	-
416.	Kab. Ngada	6.747.148
417.	Kab. Sikka	7.699.143

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
418.	Kab. Sumba Barat	14.379.401
419.	Kab. Sumba Timur	32.828.969
420.	Kab. Timor Tengah Selatan	7.207.988
421.	Kab. Timor Tengah Utara	-
422.	Kota Kupang	8.858.401
423.	Kab. Rote Ndao	14.163.141
424.	Kab. Manggarai Barat	15.112.648
425.	Kab. Nagekeo	-
426.	Kab. Sumba Barat Daya	7.651.512
427.	Kab. Sumba Tengah	14.068.155
428.	Kab. Manggarai Timur	13.820.780
429.	Kab. Sabu Raijua	15.028.755
430.	Kab. Malaka	-
431.	Provinsi Maluku	-
432.	Kab. Kepulauan Tanimbar	7.349.952
433.	Kab. Maluku Tengah	-
434.	Kab. Maluku Tenggara	-
435.	Kab. Buru	-
436.	Kota Ambon	-
437.	Kab. Seram Bagian Barat	7.578.959
438.	Kab. Seram Bagian Timur	-
439.	Kab. Kepulauan Aru	-
440.	Kota Tual	-
441.	Kab. Maluku Barat Daya	24.951.984
442.	Kab. Buru Selatan	7.792.581
443.	Provinsi Papua	-
444.	Kab. Biak Numfor	-
445.	Kab. Jayapura	-
446.	Kab. Kepulauan Yapen	-
447.	Kota Jayapura	9.043.181
448.	Kab. Sarmi	-
449.	Kab. Keerom	14.138.129
450.	Kab. Waropen	-
451.	Kab. Supiori	-
452.	Kab. Mamberamo Raya	-
453.	Provinsi Maluku Utara	-
454.	Kab. Halmahera Tengah	-
455.	Kota Ternate	-
456.	Kab. Halmahera Barat	-

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
457.	Kab. Halmahera Timur	-
458.	Kab. Halmahera Selatan	-
459.	Kab. Halmahera Utara	-
460.	Kab. Kepulauan Sula	7.424.986
461.	Kota Tidore Kepulauan	6.512.751
462.	Kab. Pulau Morotai	-
463.	Kab. Pulau Taliabu	-
464.	Provinsi Banten	6.489.293
465.	Kab. Lebak	-
466.	Kab. Pandeglang	-
467.	Kab. Serang	13.931.487
468.	Kab. Tangerang	14.333.112
469.	Kota Cilegon	-
470.	Kota Tangerang	7.136.621
471.	Kota Serang	6.807.195
472.	Kota Tangerang Selatan	14.102.879
473.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
474.	Kab. Bangka	15.785.588
475.	Kab. Belitung	20.586.869
476.	Kota Pangkal Pinang	6.985.539
477.	Kab. Bangka Selatan	14.135.124
478.	Kab. Bangka Tengah	-
479.	Kab. Bangka Barat	-
480.	Kab. Belitung Timur	14.324.031
481.	Provinsi Gorontalo	6.703.030
482.	Kab. Boalemo	8.830.786
483.	Kab. Gorontalo	7.805.609
484.	Kota Gorontalo	17.196.936
485.	Kab. Pohuwato	7.807.020
486.	Kab. Bone Bolango	15.151.916
487.	Kab. Gorontalo Utara	7.397.245
488.	Provinsi Kepulauan Riau	23.236.157
489.	Kab. Natuna	13.909.893
490.	Kab. Kepulauan Anambas	7.307.880
491.	Kab. Karimun	16.063.449
492.	Kota Batam	15.396.527
493.	Kota Tanjung Pinang	7.137.634
494.	Kab. Lingga	7.349.455
495.	Kab. Bintan	21.222.348

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
496.	Provinsi Papua Barat	-
497.	Kab. Fakfak	-
498.	Kab. Manokwari	-
499.	Kab. Teluk Bintuni	7.533.563
500.	Kab. Teluk Wondama	7.465.202
501.	Kab. Kaimana	-
502.	Kab. Manokwari Selatan	7.395.262
503.	Kab. Pegunungan Arfak	6.983.017
504.	Provinsi Sulawesi Barat	6.554.777
505.	Kab. Majene	-
506.	Kab. Mamuju	6.922.089
507.	Kab. Polewali Mandar	-
508.	Kab. Mamasa	-
509.	Kab. Pasangkayu	-
510.	Kab. Mamuju Tengah	-
511.	Provinsi Kalimantan Utara	-
512.	Kab. Bulungan	7.704.515
513.	Kab. Malinau	-
514.	Kab. Nunukan	7.233.684
515.	Kota Tarakan	-
516.	Kab. Tana Tidung	6.996.098
517.	Provinsi Papua Selatan	-
518.	Kab. Merauke	-
519.	Kab. Boven Digoel	13.786.988
520.	Kab. Mappi	14.315.743
521.	Kab. Asmat	7.230.455
522.	Provinsi Papua Tengah	-
523.	Kab. Mimika	-
524.	Kab. Nabire	14.235.394
525.	Kab. Paniai	-
526.	Kab. Puncak Jaya	6.984.355
527.	Kab. Dogiyai	-
528.	Kab. Puncak	6.963.420
529.	Kab. Intan Jaya	-
530.	Kab. Deiyai	7.221.581
531.	Provinsi Papua Pegunungan	-
532.	Kab. Jayawijaya	-
533.	Kab. Yahukimo	-
534.	Kab. Pegunungan Bintang	-

NO	PEMERINTAH DAERAH	TOTAL
(1)	(2)	(3)
535.	Kab. Tolikara	-
536.	Kab. Mamberamo Tengah	-
537.	Kab. Yalimo	-
538.	Kab. Lanny Jaya	-
539.	Kab. Nduga	-
540.	Provinsi Papua Barat Daya	-
541.	Kab. Sorong	-
542.	Kota Sorong	-
543.	Kab. Raja Ampat	-
544.	Kab. Sorong Selatan	7.294.573
545.	Kab. Maybrat	-
546.	Kab. Tambrau	-
JUMLAH NASIONAL		4.000.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

